

# ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD SCHOOL GOVERNANCE* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN POHUWATO

Hapsah J. Ibrahim, Ikhfan Haris, Arwildayanto

Universitas Negeri Gorontalo, 2021

E-mail: [hapsahibrahim21@gmail.com](mailto:hapsahibrahim21@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. (2) penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. (3) penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. (4) penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan yakni eksplanatori. Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan penyebaran kuesioner pada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sebanyak 192 orang yang kemudian dengan rumus *Slovin* diperoleh sampel sebanyak 130 orang guru. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 86,32% atau berada pada kriteria yang baik. (2) penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,52% atau berada pada kriteria baik. (3) penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,33% atau berada pada kriteria baik. (4) penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,69% atau berada pada kriteria baik

**Kata kunci:** *Good Governance, Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, Kemandirian*

## PENDAHULUAN

Capaian penting dalam bidang pendidikan menjadi tugas utama bagi pemerintah yang dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan suatu konsep dalam pelaksanaannya yakni dengan prinsip *Good governance*. Iflaha (2019) mengatakan bahwa Prinsip *Good governance* merupakan prinsip ideal untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Prinsip *Good governance* dapat pula diterapkan dalam mengelola organisasi yang lebih kecil seperti dalam lembaga pendidikan. Dasor (2018) mengatakan bahwa *Good*

*governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara ketiga domain; negara, swasta, dan masyarakat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good governance* merupakan tolak ukur suatu pemerintahan dikatakan sebagai pemerintahan yang baik.

*Good governance* yang diterapkan dalam sekolah (instansi) dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagaimana diungkapkan oleh Sedarmayanti (2009: 289)

yakni memenuhi aspek (a) akuntabilitas, (b) transparansi, (c) partisipasi, , (d) supremasi hukum. Berbagai prinsip *Good governance* telah diterapkan di Sekolah menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Pohuwato. Penerapan prinsip *Good governance* sangat perlu mendapat perhatian pemerintah karena sampai dengan saat ini. Provinsi Gorontalo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat berbagai masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tata kelola aset di Provinsi Gorontalo, di mana hal ini berkaitan dengan adanya perpindahan aset dari sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi sehingga rekonsiliasi perlu untuk terus dilakukan hingga saat ini. Oleh karena itu, Prinsip *Good governance* menjadi hal yang penting dalam tata kelola keuangan sekolah dan juga tata kelola administrasi dan teknis kependidikan dalam upaya untuk mencapai kinerja sekolah yang baik.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. Pendekatan dan Jenis penelitian ini

menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif eksplanatori (*explanatory research*). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru-guru penerapan Good Governance pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato sebanyak 192 orang, kemudian dengan rumus *Taro Yamane* diperoleh sampel sebanyak 130 orang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis skor. Menurut Widoyoko (2012), melakukan pengukuran berarti membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya dan menentukan bilangan menurut aturan tertentu.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**A. Penerapan Prinsip Transparansi pada Sekolah**

Rangkuman dari fokus penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata skor fokus penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato terletak pada kriteria yang “Baik” dengan rata-rata sebesar 86,32%.

**Tabel 1. Rangkuman Fokus Penerapan Prinsip Transparansi pada Sekolah**

Pernyataan	Skor Pernyataan								Kriteria
	SL	SR	KD	JR	TP	Aktual	Ideal	%	
Transparansi-1	0	1	9	53	67	576	650	88.62%	Baik
Transparansi-2	0	0	11	64	55	564	650	86.77%	Baik
Transparansi-3	0	1	3	70	56	571	650	87.85%	Baik
Transparansi-4	1	2	10	66	51	554	650	85.23%	Baik
Transparansi-5	1	5	14	63	47	540	650	83.08%	Baik
Transparansi-6	0	5	8	46	71	573	650	88.15%	Baik

Transparansi-7	0	1	15	56	58	561	650	86.31%	Baik
Transparansi-8	0	1	8	56	65	575	650	88.46%	Baik
Transparansi-9	0	3	14	63	50	550	650	84.62%	Baik
Transparansi-10	2	2	13	63	50	547	650	84.15%	Baik
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>105</b>	<b>600</b>	<b>570</b>	<b>5,611</b>	<b>6,500</b>	<b>86.32%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data diolah, 2021

### B. Penerapan Prinsip Partisipatif pada Sekolah

Rangkuman dari fokus penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel

2. Dari hasil pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata skor Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato terletak pada kriteria yang “Baik” dengan rata-rata sebesar 89,52%.

**Tabel 2. Rangkuman Penerapan Prinsip Partisipatif pada Sekolah**

Pernyataan	Skor Pernyataan								Kriteria
	SL	SR	KD	JR	TP	Aktual	Ideal	%	
Partisipatif-1	0	1	3	54	72	587	650	90.31%	Sangat Baik
Partisipatif-2	0	1	4	59	66	580	650	89.23%	Baik
Partisipatif-3	0	1	1	46	82	599	650	92.15%	Sangat Baik
Partisipatif-4	0	2	4	46	78	590	650	90.77%	Sangat Baik
Partisipatif-5	0	1	5	62	62	575	650	88.46%	Baik
Partisipatif-6	0	1	9	42	78	587	650	90.31%	Sangat Baik
Partisipatif-7	0	0	8	32	90	602	650	92.62%	Sangat Baik
Partisipatif-8	0	3	9	56	62	567	650	87.23%	Baik
Partisipatif-9	0	1	12	65	52	558	650	85.85%	Baik
Partisipatif-10	0	1	7	59	63	574	650	88.31%	Baik
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>521</b>	<b>705</b>	<b>5,819</b>	<b>6,500</b>	<b>89.52%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data diolah, 2021

### C. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Sekolah

Rangkuman dari fokus Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel

3. Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata skor Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato terletak pada kriteria yang “Baik” dengan rata-rata sebesar 89,33%.

**Tabel 3. Rangkuman Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Sekolah**

Pernyataan	Skor Pernyataan								Kriteria
	SL	SR	KD	JR	TP	Aktual	Ideal	%	
Akuntabilitas-1	0	2	6	67	55	565	650	86.92%	Baik
Akuntabilitas-2	0	2	7	54	67	576	650	88.62%	Baik
Akuntabilitas-3	0	1	8	43	78	588	650	90.46%	Sangat Baik
Akuntabilitas-4	0	0	8	43	79	591	650	90.92%	Sangat Baik
Akuntabilitas-5	0	2	6	38	84	594	650	91.38%	Sangat Baik
Akuntabilitas-6	0	0	6	50	74	588	650	90.46%	Sangat Baik
Akuntabilitas-7	0	1	5	63	61	574	650	88.31%	Baik
Akuntabilitas-8	0	2	12	51	65	569	650	87.54%	Baik
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>409</b>	<b>563</b>	<b>4,645</b>	<b>5,200</b>	<b>89.33%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data diolah, 2021

#### D. Penerapan Prinsip Kemandirian pada Sekolah

Rangkuman dari fokus Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel

4. Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata skor Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato terletak pada kriteria yang “Baik” dengan rata-rata sebesar 89,69%.

**Tabel 4. Rangkuman Penerapan Prinsip Kemandirian pada Sekolah**

Pernyataan	Skor Pernyataan								Kriteria
	SL	SR	KD	JR	TP	Aktual	Ideal	%	
Kemandirian-1	0	0	5	48	77	592	650	91.08%	Sangat Baik
Kemandirian-2	0	2	11	43	74	579	650	89.08%	Baik
Kemandirian-3	0	1	5	57	67	580	650	89.23%	Baik
Kemandirian-4	0	2	5	53	70	581	650	89.38%	Baik
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>201</b>	<b>288</b>	<b>2,332</b>	<b>2,600</b>	<b>89.69%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data diolah, 2021

#### Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan ditemukan bahwa penerapan prinsip *Good governance* pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 88,72% atau berada pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk kepentingan pengembangan sekolah menjadi lebih baik dan berkualitas. Penyelenggaraan pranata lembaga pendidikan (sekolah) yang baik merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sekolah merupakan tempat interaksi manusia yang memungkinkan munculnya perilaku produktif atau kontra-produktif dalam upaya pencapaian tujuan lembaga, pemenuhan terhadap tuntutan dan kepuasan *stakeholder* pendidikan, dan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya dari masyarakat dan negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan

*stakeholder* (peserta didik, orang tua, masyarakat umum, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diharapkan dapat memunculkan partisipasi dan d tra yang positif dari masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, keterlibatan *stakeholder* pendidikan dalam membina dan membantu menyelenggarakan sekolah merupakan bagian dari penyelenggaraan *good governance* pada lembaga pendidikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harsowasono (2010) bahwa *Good governance* dan otonomi daerah merupakan dua hal simetris, artinya keduanya merupakan variabel yang saling mempengaruhi di samping keduanya juga merupakan salah satu upaya menuju perwujudan demokratisasi. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di era otonomi daerah semakin menguat dan menjadi tuntutan bagi perwujudan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah. Sebagai upaya untuk dapat mewujudkan pemberian pelayanan yang baik maka salah satu *entry*

*point* yang strategis dapat ditempuh melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Pelayanan pendidikan sekolah menengah atas merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh negara bagi warga masyarakat.

#### **A. Penerapan Prinsip Transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato**

Hasil pengujian indikator pertama menunjukkan bahwa Penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 86,32% atau berada pada kriteria yang baik. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sekolah di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato menerapkan prinsip transparansi dalam menciptakan tata kelola sekolah yang baik dalam aspek keuangan maupun administratif, di mana sekolah terus berupaya untuk terbuka pada proses perencanaan pengeluaran keuangan sekolah, pada proses realisasi hingga capaian dari pekerjaan yang dilakukan oleh warga sekolah. Transparansi senantiasa dilakukan pada item-item yang seharusnya bisa untuk diinformasikan karena setiap pemangku kepentingan membutuhkan informasi tertentu dalam berbagai keputusan untuk pengembangan kependidikan khususnya Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat dari Salusu (2016: 129) bahwa kebanyakan guru masih menganggap tugasnya adalah

mengajar. Setelah mereka mengajar maka mereka bebas dari tugas. Hal ini tidaklah salah, namun dalam perspektif yang lebih jauh, guru harus mampu menjawab pertanyaan untuk apa mereka mengajar. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh semua personil sekolah harus mengarah pada satu tujuan bersama.

#### **B. Penerapan Prinsip Partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato**

Hasil pengujian indikator kedua menunjukkan bahwa Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,52% atau berada pada kriteria baik. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato menerapkan prinsip partisipatif dengan efektif dengan aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti komite sekolah, *stakeholder* kependidikan dan masyarakat. Aktifnya partisipatif dari berbagai pihak menjadi sebuah kontrol penting bagi sekolah agar mampu dikelola dan dioptimalkan kinerjanya secara kelembagaan agar mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Prinsip partisipatif yang diterapkan oleh sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato dengan baik ini tentu akan menciptakan sebuah keunggulan bagi sekolah dalam pengelolaan keuangan, pembelajaran maupun administrasi kependidikan yang semakin efektif dan efisien.

Hal ini sesuai dengan temuan Harsowasono (2010) bahwa Untuk dapat meningkatkan pelayanan bidang pendidikan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Indikator *good governance* yang dipilih yaitu partisipasi, persamaan dan keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan strategi visi, dapat di ambil beberapa kesimpulan. Dalam pelaksanaan prinsip partisipasi belum ada mekanisme partisipasi yang cukup signifikan terutama pada level pemerintah daerah, sedangkan pada beberapa kasus di level sekolah terdapat hal-hal yang mengarah pada adanya partisipasi publik..

#### **C. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato**

Hasil pengujian indikator ketiga menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,33% atau berada pada kriteria baik. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik oleh sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menciptakan *Good Governance* dalam organisasi sektor publik kependidikan.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Liang Gie dkk. (2002:4), akuntabilitas lebih mengarah pada proses panggilan jiwa yang merupakan suatu kebutuhan dari dirinya sendiri untuk mendapat umpan balik dari

*stakeholder*-nya atau pemberi pekerjaannya. Artinya dapat dikatakan, akuntabilitas kerja masih dalam tataran wacana, belum sampai pada asumsi dan perilaku yang menetap. Kalaupun ada, dasar dari akuntabilitas adalah tuntutan juklak-juknis, bukan sebagai kebutuhan profesional.

#### **D. Penerapan Prinsip Kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato**

Hasil pengujian indikator keempat menunjukkan bahwa penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,69% atau berada pada kriteria baik. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa adanya efektivitas kemandirian dari warga sekolah dalam pengelolaan keuangan, pembelajaran dan administrasi sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. Kemandirian sekolah sebagai suatu upaya otonomi bagi sekolah agar seluruh kegiatan dan operasional sekolah menjadi tanggung jawab sekolah tersebut dalam menciptakan *Good Governance* dalam lingkungan sekolah. Sekolah yang mandiri menjadi sebuah refleksi untuk menuju sekolah yang unggul dalam berbagai lini penilaian sekolah tersebut, olehnya kemandirian perlu ditingkatkan dengan pengembangan kapasitas bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola sekolah yang baik khususnya sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.

Hasil ini sesuai pendapat Herawan (2018) bahwa penyelenggaraan tata



pemerintahan yang baik merupakan salah satu isu nasional yang sedang diluncurkan pemerintah saat ini. Namun demikian, pada level implementasi di dunia pendidikan, diduga hal ini masih jauh dari harapan, bahkan ada sinyal praktik-praktik yang salah berlangsung dalam penyelenggaraan sekolah.

Secara keseluruhan hasil ini sesuai dengan pendapat teori dari Herawan (2017) bahwa kepala sekolah menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa, bahkan ada guru yang mengidolakan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk terrealisasinya *good governance* di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga memotivasi warga sekolah untuk terrealisasinya *good governance*. Peran guru yang muncul secara intens dalam implementasi *good governance* adalah sebagai pelaksana. Sedangkan peran sebagai pendorong dan pemikir mengenai bagaimana proses *good governance* dilakukan, masih belum diketahui dan masih belum muncul secara masif. Prediksi akan sebab dari masalah ini adalah karena asumsi guru yang menganggap bahwa tugasnya adalah melakukan pembelajaran, sehingga berbagai hal yang terkait dengan *good governance*, mereka lebih memilih menjadi pelaksana, karena kewajibannya menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah beserta komite sekolah.

## SIMPULAN

1. Penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten

Pohuwato memiliki skor sebesar 86,32% atau berada pada kriteria yang baik yang berarti bahwa sekolah di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato menerapkan prinsip transparansi dalam menciptakan tata kelola sekolah yang baik dalam aspek keuangan maupun administratif.

2. Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,52% atau berada pada kriteria baik yang berarti bahwa sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato menerapkan prinsip partisipatif dengan efektif dengan aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti komite sekolah, *stakeholder* kependidikan dan masyarakat.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,33% atau berada pada kriteria baik yang berarti bahwa akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik oleh sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menciptakan *Good Governance* dalam organisasi sektor publik kependidikan.
4. Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato memiliki skor sebesar 89,69% atau berada pada kriteria baik yang berarti bahwa adanya efektivitas

kemandirian dari warga sekolah dalam pengelolaan keuangan, pembelajaran dan administrasi sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato. Kemandirian sekolah sebagai suatu upaya otonomi bagi sekolah agar seluruh kegiatan dan operasional sekolah menjadi tanggung jawab sekolah tersebut dalam menciptakan *Good Governance* dalam lingkungan sekolah.

## SARAN

1. Prinsip transparansi perlu dioptimalkan dengan melibatkan semua guru dan berbagai elemen terkait dalam melakukan perencanaan agar tidak terjadi asimetris informasi yang diterima oleh kepala sekolah sehingga perencanaan yang dilakukan kurang optimal atau dalam hal ini kepala sekolah akan mengambil langkah konseptual dan pengembangan sekolah yang kurang tepat. Selain itu perlunya kepala sekolah melakukan *monitoring* rutin untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam menunjang kemampuan konseptual dalam merencanakan pengembangan sekolah yang lebih baik.
2. Perlu adanya upaya konkret dalam peningkatan prinsip partisipatif yakni dengan melakukan kerja sama bukan hanya dengan masyarakat, *stakeholder* pendidikan dan warga sekolah namun juga memanfaatkan alumni dari sekolah tersebut minimal setahun sekali untuk saling koordinasi dan tukar pikiran mengenai pengembangan sekolah yang lebih baik. Kemudian juga melibatkan pihak swasta seperti mengajukan berbagai hal yang positif kepada swasta yang melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar supaya siswa-siswa yang kurang mampu dan kategori lainnya dapat terbantu.
3. Upaya akuntabilitas berbagai kegiatan sekolah perlu ditingkatkan dengan membuat sebuah sistem yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo dengan sekolah-sekolah Menengah Atas agar sistem dan aplikasi ini menjadi sebuah kontrol untuk menilai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja guru dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Pentingnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo untuk melakukan upaya peningkatan kompetensi dan komitmen dari guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya dalam upaya untuk meningkatkan capaian penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam organisasi sektor publik di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Adelia, Rifka. 2015. Pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian Intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut Temuan audit terhadap penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik (good government governance) (Studi Empiris Pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di Kementerian Republik Indonesia ). *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Arwildayanto; Nina Lamatenggo; dan Warni Tune Sumar. 2017. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Barat: Widya Padjadjaran
- Bakri, Amri T. Roli Ilhamsyah Putra. 2015. Peran kepemimpinan dan manajemen berbasis Sekolah terhadap kinerja guru dan pengawas Sekolah menengah di kabupaten aceh tengah. *Jurnal Manajemen* ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Fadil, Fathurrahman et al. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2.
- Haris, Ikhfan 2016. *Indeks Kinerja Sekolah: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kemandirian Mutu dan Inovasi Pengelolaan Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Hermawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas
- Iflaha, Nurul. 2019. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Kurikulum. *Jurnal Al-Yasini Volume 4 Nomor 1*.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kusmayadi, Dedi; Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. 2017. *Pemodelan Tata Kelola Sekolah Yang Baik Pasca Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tasikmalaya*. *Jurnal Pendidikan Universitas Siliwangi*.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mas, Sitti Roskina. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal el-Hikmah* Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Mulyasa. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang :UMM Press.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi komunikasi*, bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rewansyah, Asmawi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA-LAN Jakarta.
- Ruliaty. 2011. Strategi Mewujudkan Good Governance Melalui Transparansi Pelayanan Publik. *AL-FIKR: Vol 15, No. 3:553-563*
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Sedarmayanti, 2009, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: Mandar Maju.
- Soetrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujata, Antonius.. 2006. *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Gramedia
- Sumarsono, Hadi. 2003. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1*
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Tajuddin. 2008. Good Governance (Konsep dan Implementasi di Kabupaten Bangka). [www.bangka.co.id](http://www.bangka.co.id) diakses pada 5 Agustus 2020
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: Elsam dan Huma